

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Isu dalam Hubungan Internasional dewasa ini telah banyak menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi mulai dari *trans national crime*, *human security*, pemanasan global (*global warming*) dan konflik. Konflik dapat terjadi di antara dua atau lebih suatu Negara dan terjadi dalam sebuah Negara. Konflik terjadi karena terdapat suatu pertentangan atau perbedaan kepentingan. Terdapat 2 macam jenis konflik yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Konflik horizontal merupakan konflik yang pada umumnya terjadi antar 2 negara atau lebih, sedangkan konflik vertikal merupakan pertikaian yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah (Susan 2009, hlm.99).

Setelah berlangsungnya Perang Dunia 1 dan 2 serta Perang Dingin masih terdapat banyaknya konflik yang mewarnai hubungan internasional. Konflik ini bersifat internal maupun eksternal dan dapat di selesaikan dengan jalur damai maupun jalur non-damai. Perang atau bisa di sebut dengan konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan lagi termasuk dalam konflik horizontal, tetapi justru termasuk dalam konflik vertikal. Kondisi ini berkembang setelah Perang Dunia I. Pertikaian yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah dalam pengertian konflik vertikal, bisa di artikan dengan pemberontakan. Pemberontakan adalah dinamika yang sering terjadi dalam dunia internasional salah satunya Afrika. Hampir disetiap negara Afrika pernah mengalami konflik dalam internal negaranya. Salah satunya yang terjadi di Afrika Utara tepatnya di Libya.

Konflik Libya terjadi pada tahun 2011, dimana pemberontakan yang di lakukan oleh rakyat Libya terhadap rezim Muammar Khadafi dan di picu oleh serangkaian peristiwa di Timur Tengah atau lebih di kenal dengan “Revolusi Melati” (Aksi menumbangkan penguasa penguasa yang dianggap terlalu otoriter; Melati sebagai lambang kesucian mempunyai aroma yang harum semerbak. Demonstran yang gugur dianggap suci, yang darahnya harum, seharum melati). Gelombang revolusi ini selain merambat ke Negara-negara di Timur Tengah juga

merambat ke Libya. Nasib Libya jika di bandingkan dengan Negara-negara di Timur Tengah lainnya bisa di katakan lebih tragis karena terimbas aksi para pemberontak. Libya jatuh dalam perang saudara. Konflik ini merupakan efek domino yang di hasilkan dari Arab Spring. Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab. Peristiwa ini diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke negara-negara lain, seperti Mesir, dan Syiria. Berbeda dengan yang terjadi di Mesir dan Tunisia, Khadafi secara aktif merespon tekanan dari kubu oposisi. Khadafi menggunakan cara brutal dengan menggunakan kekuatan militernya dan menggalang dukungan dari para pengikut setianya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa di Libya. Sehingga hal ini menimbulkan banyak korban yang cukup banyak dari rakyat sipil yang memperjuangkan kebebasan dan pemerintahan yang demokratis. Konflik yang terjadi di Libya ini pada awalnya merupakan konflik internal. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik ini meluas menjadi isu internasional. Karena semakin parahnya konflik tersebut dan angka korban jiwa semakin banyak, menyebabkan pihak asing masuk, salah satunya adalah Perancis. Perancis merespon dengan keras atas ketidaksepakatan tindakan militer yang di lakukan pemimpin Libya, Moammar Khadafi oleh para pemberontak tersebut. Ini di buktikan dengan Perancis merupakan Negara pertama yang mengakui otoritas pemberontak sebagai perwakilan dari rakyat Libya di kota timur Benghazi (Cowel 2011, hlm.1) dan merupakan Negara yang memimpin dalam berlangsungnya aksi intervensi militer.

Terdapat faktor yang membuat Perancis begitu gigih dalam melaksanakan intervensi militer di Libya. Perancis di anggap sebagai salah satu Negara yang memiliki kewajiban membantu dalam penyelesaian konflik di Libya. Salah satu faktornya ialah Libya merupakan bekas jajahan Perancis dari tahun 1943 sampai 1951 ([U.S Departement of State](#) 2011, hlm.1) setelah Perancis dan Inggris berhasil “menyapu bersih” Italia yang pada masa sebelumnya menjajah Libya. Wilayah Fezzan Ghadames adalah wilayah di bagian selatan dari bekas koloni Italia Libya dan dikendalikan oleh Perancis dari tahun 1943 sampai kemerdekaan Libya pada 1951. (Long & Reich 2010, hlm.370) Setelah kemerdekaan Libya pada tahun 1951, Perancis tetap menjalin hubungan baik dengan Libya baik secara bilateral

seperti menyepakati berbagai proyek, antara lain pembangunan reaktor atom (Okezone.com 2007, hlm.1).

Perancis merupakan Negara yang selalu aktif dalam keanggotaannya di berbagai organisasi internasional termasuk menyelesaikan permasalahan di dunia demi menciptakan keamanan dan ketentraman dunia. Salah satunya adalah keikutsertaannya bersama DK PBB dalam menyelesaikan konflik di Libya pada tahun 2011. Konflik di Libya telah menjadi sorotan dunia internasional. Berawal dari pernyataan duta besar di Libya untuk PBB, Abdurrahman Mohammed Shalgham pada tanggal 25 Februari 2011 kepada para diplomat koleganya di PBB yang meminta bantuan dunia Internasional untuk mengintervensi Libya untuk membebaskan rakyat dari jeratan diktator Khadafi. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan. Karena belum pernah ada duta besar Libya berani menantang Khadafi secara terbuka. Pernyataan Shalgham tersebut kemudian menjadi senjata yang bisa di gunakan untuk menyerang Khadafi (Inilah.com 2011, hlm.2).

Pernyataan Shalgham di PBB merupakan awal bagi pembentukan opini agar Perancis dan para sekutu AS menyerang Libya. Bahwa hal ini bukan karena hanya kelompok oposisi yang tidak tahan dengan perlakuan Khadafi, tetapi termasuk Duta Besar Libya di PBB yang sesungguhnya merupakan orang kepercayaan Khadafi. Pada hari Kamis 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB melakukan sidang yang menghasilkan bahwa Amerika Serikat, Inggris serta Perancis bertugas untuk melakukan Intervensi Militer ke Libya. Terkait situasi tersebut, PBB mengeluarkan resolusi 1973 yang menyatakan otorisasi aksi untuk melindungi penduduk sipil Libya dari Moammar Khadafi (NATO 2012, hlm.3).

Libya adalah negeri yang kaya akan minyak. Perancis sendiri sangat membutuhkan Libya, sebagai Negara pemasok minyak terbesar mencapai 15% dan sangat berpengaruh dalam perekonomian perancis dari kebutuhannya sebelum konflik melanda Libya memerlukan impor minyak yang signifikan dari Negara ini. Adanya kepentingan perancis di Libya membuat perancis menjadi salah satu Negara Eropa yang paling aktif dalam usaha penyelesaian konflik yang terjadi di Libya.

I.2 Rumusan Permasalahan

Selama terjadi konflik, pemerintah perancis terus melakukan pantauan perkembangan konflik yang terjadi di Libya. Analisis terhadap kasus konflik Libya di fokuskan pada masa pemerintahan Nicholas Sarkozy. Hal ini di karenakan, Konflik di Libya terjadi pada tahun 2011. Ada hal lain yang perlu di lihat dalam membedah konflik di Libya, salah satunya adalah peran Negara-negara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan pernyataan adalah: “Apa kepentingan Perancis dalam penyelesaian konflik di Libya?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai bagaimana bentuk intervensi militer Perancis terhadap konflik di Libya
- b. Untuk memahami apa yang terjadi dalam konflik di Libya
- c. Untuk menganalisis apa kepentingan Perancis dalam intervensinya di Libya.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi manfaat dari segi praktis maupun akademis.

- a. Dari segi praktis, semoga saja penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi orang-orang yang belum mengetahui secara lebih jauh mengenai bagaimana intervensi Perancis terhadap konflik di Libya mengenai isu revolusi melati tahun 2011 lebih menggunakan pendekatan diplomatis dan multilateral.
- b. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami konflik di Afrika Utara dan Timur tengah mengenai isu revolusi melati serta dapat memahami konstelasi politik kedua kawasan tersebut. Penulis pun mengharapkan para pembaca dapat memahami peran Perancis di konflik Libya serta kepentingan Perancis dalam konflik tersebut.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam buku *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah* karya M. Agastya ABM menjelaskan peristiwa *arab spring* serta membahas tentang perjalanan dan perkembangan Arab Spring di beberapa Negara di Timur Tengah. Dari semua Negara di Timur Tengah yang terkena imbas Arab Spring, buku ini mencoba menyajikan perjalanan dan perkembangan Arab Spring di enam Negara di Timur tengah, yakni Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah serta Bahrain. Arab Spring “meledak” hampir di seluruh wilayah Timur Tengah. Sebab, ke enam Negara tersebut merupakan Negara-negara strategis dan penting di Timur Tengah, yang menjadi rebutan oleh banyak pihak. Dari ke enam Negara tersebut, penulis hanya memfokuskan revolusi di Libya saja sesuai dengan topik skripsi yang akan penulis ambil. Gelombang revolusi ini, selain merambat ke Negara-negara di timur tengah juga merambat ke Libya.

Nasib Libya jika di dibandingkan dengan Negara-negara di Timur Tengah lainnya bisa di katakan lebih tragis karena terimbas aksi para pemberontak. Konflik di Libya ini adalah efek domino dari Arab Spring. Revolusi tersebut bertujuan menggulingkan diktator yang berkuasa di Negara-negara timur tengah termasuk Libya yang menggulingkan rezim otoriter yang menguasai Negara tersebut selama 39 tahun, yakni rezim Muammar Khadafi. Muammar Khadafi adalah tokoh dunia arab yang kontroversial dan menjadi salah satu tokoh yang kerap memicu “kekesalan” dunia barat karena sepak terjangnya. Di bawah kekuasaannya, Libya menjadi salah satu Negara yang di isolasi barat dalam dunia Internasional. Kekuasaan yang hampir 42 tahun, telah menempatkan Muammar Khadafi menjadi kekuasaan terlama sebagai pemimpin non-kerajaan ke empat sejak tahun 1900 dan terlama sebagai pemimpin penguasa arab. Di buku ini di jelaskan daftar kekejaman yang telah di lakukan Rezim Muammar Khadafi selama berkuasa di Libya sehingga membuat rakyat Libya membuat gerakan demokrasi menentang Muammar Khadafi. Karena kejahatan dan kekejaman itulah, maka Arab Spring yang bergulir di Tunisia menjadi inspirasi bagi rakyat Libya untuk melakukan aksi massa (revolusi) yang bertujuan untuk menggulingkan rezim dictator yang selama kurang lebih 42 tahun menguasai Libya.

Dalam buku ini di sebutkan beberapa faktor yang mendorong atau memicu gerakan oposisi untuk menggulingkan rezim Muammar Khadafi sampai pada akhirnya pihak oposisi berhasil menggulingkan pemerintah otoriter tersebut. Dalam keberhasilan tersebut tentu saja terdapat pihak-pihak asing yang berada di balik para pejuang Revolusi Libya, terdapat NATO serta Negara-negara barat seperti AS, Perancis, Inggris dan Negara barat lainnya.

Topik yang diangkat dalam buku ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Kesamaan tersebut terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu konflik Libya serta Intervensi Negara-negara Barat seperti Perancis ke konflik Libya ini. Buku ini banyak memaparkan bagaimana konflik Libya terjadi hingga saat ini dan menjelaskan bagaimana sikap Negara-negara barat dalam intervensinya di konflik ini, sehingga buku ini banyak memberikan data-data kepada penulis terkait penelitiannya.

Namun demikian, buku ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada topik yang akan diangkat penulis yaitu keterlibatan Perancis dalam intervensi militer di Libya. Dalam buku ini sangat sedikit dibahas bagaimana keterlibatan Perancis serta sikap Perancis dalam konflik ini. Jadi, sikap Perancis serta keterlibatan Perancis sangat sedikit serta tidak lengkap di jelaskan dalam buku ini sedangkan fokus penulis pada penelitian yang akan diangkatnya adalah apa keterlibatan Perancis di Libya.

Dalam buku ***Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*** karya Apriadi Tamburaka, S.IP menjelaskan tentang kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang di kenal dengan Revolusi Melati atau dengan sebutan *Arab Spring*. Timbulnya pergolakan rakyat di Semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara begitu cepat dan membutuhkan “pematik api” untuk menyalakan api dalam sekam yang sudah lama tersimpan siap membakar. Pada akhirnya terbukti, api tersebut betul-betul membakar rakyat di kawasan Timur Tengah untuk menumbangkan rezim penguasa mereka. Hal ini tidak terkecuali di rasakan oleh rakyat Libya.

Dalam buku ini juga di bahas tentang Libya pra Revolusi dalam bidang Ekonomi dan Politik. Libya pra Revolusi dalam hal ekonomi tentu kita tahu bahwa Libya kaya berkat melimpahnya sumber minyak. Pendapatan dari ekspor

minyak mencapai kurang lebih dari 1 miliar dollar AS per tahun (Tamburaka 2011, hlm.221). Sementara cadangan minyaknya kurang lebih mencapai 46,22 miliar barel. Bagi dunia, minyak Libya dengan Khadafi di dalamnya tidak bisa di anggap enteng. Sebagai eksportir minyak nomer 12 dunia, posisi Libya sangat penting bagi Eropa. Italia, Jerman dan Perancis mengonsumsi lebih dari setengah produksi minyak negeri itu. Krisis politik telah menyebabkan setengah produksinya berhenti. Harga minyak dunia langsung melambung menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel. Itulah pengaruh Libya terhadap dunia. Setelah keluar dari “era dingin” pada tahun 2004, hubungan Eropa dan Libya berkembang pesat. Libya adalah pemasok terbesar ketiga minyak ke Eropa, yang baru-baru ini melampaui posisi Arab Saudi. Minimnya investasi barat, membuat Libya potensi menjanjikan, bagi ekonomi barat yang bergantung pada minyak Negara Afrika ini.

Sama seperti penelitian penulis yang akan membahas tentang konflik di Libya, dalam buku ini dipaparkan secara lengkap bagaimana terjadinya konflik di Libya dan beberapa kepentingan dari Negara Barat tidak terkecuali Perancis. Namun demikian, perbedaan buku ini dengan penelitian penulis, tidak di jelaskan bagaimana intervensi militer Perancis serta Negara-negara barat lain di Libya.

Dalam Tesis yang berjudul *The French Leadership Towards The Intervention in Libya* oleh Isabelle Fischer (September 2011) tentang memahami posisi Perancis, atau lebih khususnya mengenai tindakan kepemimpinan Perancis dalam intervensi di Libya pada tahun 2011. Tesis ini mengeksplorasi kebijakan Perancis dalam krisis di Libya dan timbul pertanyaan mengapa Perancis aktif dalam campur tangannya konflik di Libya? kata intervensi dapat dipahami sebagai "Intervensi harus berusaha untuk mempengaruhi struktur otoritas, apakah itu untuk menggulingkan elit yang berkuasa atau untuk mendukung status quo" (Reagan 2010, hlm.458).

Pada awal krisis di Libya, Perancis membuka jalan untuk masyarakat internasional dalam mengambil langkah-langkah konkret dalam menggulingkan rezim Khadafi. Sayangnya, pengunjung rasa di Libya harus menghadapi dengan tangguh kekuatan dan kebrutalan yang di lakukan oleh rezim Khadafi. Termasuk serangan pesawat terhadap warga sipil. Diplomat Libya dan pejabat berpangkat

tinggi memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengutuk tindakan Khadafi, menekan Masyarakat Internasional untuk mengambil perhatian khusus dari peristiwa ini. Para pemimpin politik di seluruh dunia mengutuk situasi yang terjadi dan meminta dialog politik dan negosiasi damai. Terlepas dari ini, Khadafi tidak mengakui keinginan masyarakat internasional dan terus menyerang para pengunjuk rasa. Pada titik ini masyarakat internasional ragu-ragu untuk mengambil sikap yang jelas terhadap Khadafi dan rezimnya.

Lima hari setelah pemberontakan dimulai di Benghazi, Dewan Uni Eropa mengeluarkan press release, menyatakan keprihatinannya atas situasi dan mengutuk kekerasan terhadap para demonstran dan kekerasan terhadap unit sipil. Uni Eropa juga menawarkan dukungan bantuan kemanusiaan dan kemungkinan imigrasi dan pengungsian (EU Council 2011, hlm.5).

Konflik di Libya baru-baru ini dan masih kurangnya informasi lebih dalam tentang pemahaman kepentingan utama dan motif Negara Perancis dengan menekan masyarakat internasional menjatuhkan rezim Khadafi melalui intervensi militer di Libya. Hal ini dapat ditentukan bahwa kedua stabilitas lingkungan mediteranian selatan dan isu-isu HAM adalah bagian dari argumen keamanan selama proses intervensi berlangsung. Namun demikian tidak dapat ditentukan sampai sejauh mana motif ini berlangsung atau apa yang mendasari kepentingan ini. Hal ini dapat berspekulasi bahwa minyak merupakan masalah penting, meskipun ini harus lebih dianalisis secara rinci dengan banyak informasi yang tersedia. Hal ini juga dapat berspekulasi bahwa Sarkozy sedang berusaha untuk mendapatkan citra politik dalam pemilihannya kembali pada tahun 2012. Hal ini jelas bahwa Libya dan tetangganya memainkan peran penting dalam agenda Perancis. Dinamika keamanan di wilayah tersebut memiliki dampak yang tinggi dalam kebijakan Perancis. sekarang jelas bahwa Perancis bertujuan akan berhubungan kuat dengan negara-negara di kawasan ini untuk mengatasi tantangan yang mungkin bisa terjadi. Hal ini masih harus dilihat kedepannya bagaimana Hubungan Perancis-Libya setelah Perancis mendapatkan keinginannya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa negara-negara Eropa mungkin tidak ada dalam perjanjian ketika berhadapan dengan masalah keamanan di luar perbatasannya. Ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga

Uni Eropa dalam mencari konsensus atas tantangan keamanan di masa depan. Hal ini terbukti bahwa Perancis masih berkeinginan untuk memegang posisi kekuasaan dan mencapai untuk melakukan hal tersebut sampai batas tertentu.

Topik yang diangkat dalam Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis. Kesamaan tersebut terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu intervensi militer Perancis di Libya. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan Tesis ini yang tidak di jelaskan seperti apa kepentingan Perancis dalam konflik tersebut.

Dalam jurnal yang berjudul *Setting the Stage for the Military Intervention in Libya* oleh Madelene Lindström dan Kristina Zetterlund menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang mengarah ke Intervensi militer di Libya pada tahun 2011. Jurnal ini menganalisa apakah ada implikasi yang dapat ditarik untuk Uni Eropa dan NATO kemampuan masa depan untuk bertindak militer. Perhatian khusus diberikan untuk posisi beberapa negara anggota kunci NATO, termasuk Perancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat.

Dunia menyaksikan dengan percaya bagaimana revolusi Libya berlangsung pada pertengahan Februari 2011, hanya beberapa minggu setelah pemberontakan di negara tetangga Tunisia dan Mesir. Apa yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring berada dalam kekuatan penuh. Protes terhadap rezim Khaddafi yang tersebar di seluruh negeri setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan terhadap demonstran di Benghazi yang menuntut pembebasan aktivis hak asasi manusia. Pemberontakan segera menjadi konflik bersenjata dan sebagai protes tumbuh kuat, Khaddafi memerintahkan serangan udara terhadap pemberontak. Dalam banyak disiarkan pidato pada 22 Februari, Khaddafi bersumpah untuk berjuang sampai titik darah dan mengancam untuk membersihkan Libya satu demi satu, membunuh para pengunjuk rasa seperti tikus. Perancis dan Inggris (UK) diasumsikan memimpin dalam mendorong untuk masyarakat internasional untuk campur tangan secara militer untuk melindungi warga sipil Libya dan juga, kemudian, menyumbang sebagian besar dari serangan udara tempur. Khadafi adalah pemimpin yang kontroversial. Konflik terjadi dengan begitu cepat dan digambarkan media seperti permainan di mana perkelahian baik dan jahat terjadi. Seperti selayaknya di atas panggung, berbagai negara diasumsikan bagian yang

berbeda. Khadafi memainkan sosok penjahat.

Di antara tokoh yang baik, Perancis, dengan Presiden Sarkozy mencuri banyak pusat perhatian seluruh krisis. Inggris juga mengambil bagian memimpin, tetapi muncul agak lebih berhati-hati bila dibandingkan dengan Perancis, dengan Perdana Menteri Cameron berulang kali menemukan dirinya diplomatis satu langkah di belakang Presiden Perancis. Rekan Eropa mereka Jerman yang tampaknya menjadi demam panggung, memutuskan untuk membatalkan penampilan semua bersama-sama. agak berbeda. Sementara tahap ditetapkan untuk krisis Libya mungkin telah unik, adalah mungkin untuk membedakan beberapa kecenderungan umum yang berkaitan dengan hubungan internasional, dan Uni Eropa dan NATO pada khususnya.

Sama seperti penelitian yang akan dibahas oleh penulis yang membahas tentang intervensi militer Perancis dalam konflik di Libya, dalam jurnal ini dipaparkan kerjasama intervensi militer Negara barat bersama NATO di Libya tidak terkecuali dengan Perancis serta membahas kepentingan Negara Barat yang ikut andil dalam intervensi militer dalam konflik ini. Namun tidak di jelaskan bagaimana berlangsungnya intervensi militer tersebut, berbeda dengan penulis yang akan membahasnya dalam bab II.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Intervensi Militer (*Military Intervention*)

Intervensi militer didefinisikan sebagai awal tindakan terang-terangan kekuatan militer di negara lain. Hal itu adalah bentuk spesifik dari intervensi. intervensi telah digunakan untuk banyak hal, termasuk: gangguan dalam urusan dalam negeri, urusan luar negeri gangguan, bentuk-bentuk khusus dari tindakan, penetrasi asing dengan motif yang tidak layak, pemaksaan, dan setiap tindakan pengaruh di antara negara-negara berdaulat. Intervensi militer menjadi awal aksi militer oleh angkatan bersenjata resmi satu negara di luar perbatasannya sendiri dan di dalam wilayah negara lain, termasuk: penembakan angkatan laut, pemboman atau penembakan udara, dan penyebaran pasukan tempur dalam pertempuran atau dalam modus siap tempur. Tindakan pelanggaran intervensi militer apakah niat mereka adalah hukuman atau tidak, apakah mereka

mendukung pemerintahan yang ada atau merusaknya. Intervensi militer adalah penebus lebih mencolok daripada bentuk-bentuk yang lebih rendah dari intervensi, seperti operasi rahasia, bantuan militer dan penetrasi diplomatik dan ekonomi. Itu lebih provokatif dari sekadar unjuk kekuatan atau tindakan kekerasan di laut.

Menurut para ahli, *Knudsen (1997)* intervensi militer merupakan kediktatoran atau sebuah campur tangan yang koersif di dalam level yuridiksi di atas negara yang berdaulat untuk melindungi atau member kebebasan seorang individu dalam menghadapi tindakan atau genosida. Sedangkan menurut *Pearson and Baumann (1993,)* Intervensi militer didefinisikan secara operasional sebagai pergerakan pasukan-pasukan atau kekuatan kekuatan (pasukan udara, laut, tembak dll) di dalam suatu negara dengan konteks beberapa isu politik atau kekacauan.

I.6.2 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional adalah bentuk atau realisasi dari tujuan-tujuan umum suatu negara untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-negara lain. Negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik bersifat kerja sama maupun konflik. Teori mengenai kepentingan nasional suatu negara dan bagaimana kepentingan nasional itu menggerakkan suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Teori mengenai kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau: *'The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.'* (Buchan 2012, hlm.7).

Kepentingan nasional dari sebuah negara tidak hanya didasarkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan internal bagi setiap warganegara. Tetapi juga menyediakan pertahanan terhadap agresi dari luar, dan melindungi nilai-nilai Negara dan cara hidup. Selain kekuatan politik, kapabilitas militer juga menjadi esensi dari kekuasaan. 'Untuk menjamin agar tidak ada negara-negara berkekuatan besar (*great powers*) berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, paksaan atau penggunaan kekuatan

yang sewenang-wenang, adalah penting bagi suatu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militer' (Sorensen 1999, hlm.5).

Dengan demikian teori kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat diperoleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.

Dalam hubungan Internasional kepentingan Nasional merupakan inti untuk menganalisa perilaku suatu Negara. Keadaan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan suatu Negara dapat berjalan stabil seiring dengan tercapainya sebuah kepentingan Nasional Negara tersebut. Konsep mengenai kepentingan nasional memang sangat sulit untuk digeneralisasikan mengenai apa saja yang termasuk dalam *national interest* melihat pemerintahan yang berbeda-beda tiap negara yang tentu menghasilkan *national interest* yang berbeda pula, bahkan tidak jarang *national interest* ini duduk berlawanan antarnegara satu dengan negara yang lain. *National interest* merupakan dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

Pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berisi cara tertentu untuk membantu negara-negara mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional selalu diperjuangkan setiap bangsa atau negara dalam rangka ketertiban nasional. Kepentingan nasional memberikan ukurankonsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Pembentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama meskipun masih bersifat abstrak dalam merumuskan suatu kebijakan ataupun politik luar negeri (Mas' oed 1998, hlm.7).

Soepatro dalam bukunya yang berjudul Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku tahun 1997, halaman 143 Mengatakan bahwa Kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional pada peran, kebijaksanaan maupun perencanaan yang dituju.

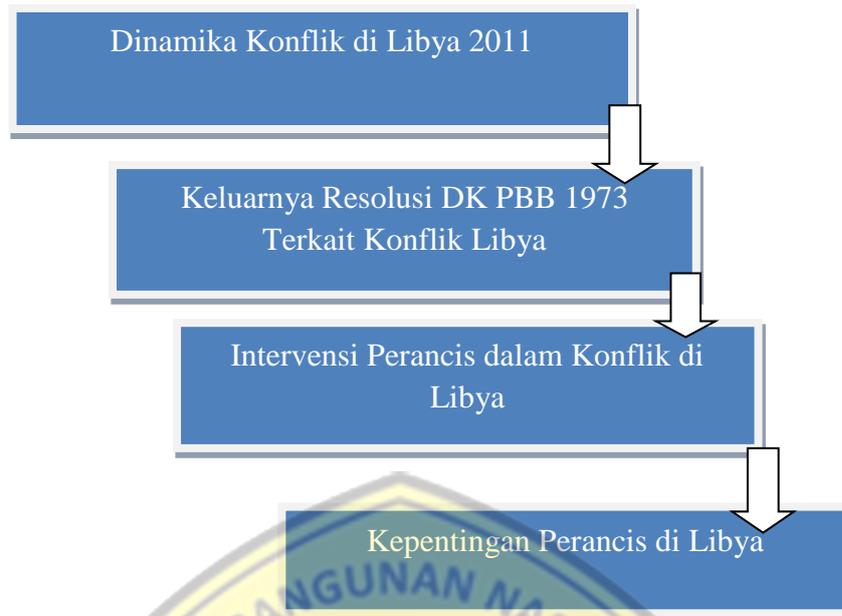
Pada dasarnya ada dua fungsi dari national interest. Yang pertama adalah menentukan arah para pemimpin negara dalam politik luar negeri. Dan juga sebagai ukuran keberhasilan pemimpin negara menjalankan politik luar negerinya. (Papp 1988, hlm.29) mengatakan dalam teori kepentingan nasionalnya, bahwa dalam *national interest* terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh negara tersebut dirangkum dalam sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri dapat dibagi kedalam beberapa klasifikasi untuk lebih memahami terhadap lingkungan Internasional:

- a. *Importance*: dimana kepentingan ini dinilai primer dalam tingkat kepentingan negara. Dalam klasifikasi Important terbagi menjadi dua bagian yakni:
 - 1) *Vital* adalah dimana kepentingan ini harus segera dipenuhi karena dapat membahayakan negara.
 - 2) *Secondary* adalah kepentingan yang juga penting tetapi tidak terlalu mendesak .
- b. *Duration*: kepentingan yang dinilai berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Duration dibagi lagi menjadi dua macam.
 - 1) *Permanent* adalah dimana kepentingan ini bersifat permanen, Dan
 - 2) *Temporary* adalah dimana kepentingan ini hanya untuk sementara.
- c. *Compatibility*: kepentingan nasional yang dilihat dari sisi kesesuaian kepentingan.
- d. *Specificity* : kepentingan tingkat ini dilihat dari khusus atau umum.

Klasifikasi kepentingan nasional inilah yang menjadi pedoman negara dalam memberikan keputusan dan juga kebijakan yang tepat dalam memenuhi kepentingan nasional.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Asumsi yang di peroleh adalah:

- a. Keterlibatan Perancis dalam intervensi di Libya di karenakan adanya kepentingan perancis dari Negara tersebut.
- b. Kekayaan akan minyak di Libya membuat banyak Negara barat ingin melakukan intervensi ke dalam konflik di Libya. Tidak terkecuali Perancis

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang di pergunakan adalah bersifat penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif di mana tipe deskriptif ini karena metode deskriptif dapat artikan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

I.9.2 Jenis Data

Bentuk penelitian ini adalah penelitian non-reactive (*non-reactive research*) seperti *documentary research* (studi dokumen baik itu dokumen primer maupun sekunder), *literature assessing research* dan *secondary data analysis* (analisis data sekunder).

I.9.3 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif (verbal data) baik dokumen primer maupun sekunder.

I.9.4 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model studi kasus atau model komparatif (*comparative method*).

I.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa (*Library Research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I.9.6 Metode Analisis

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data terlebih dahulu mencari berbagai macam sumber baik buku, jurnal, maupun artikel berita. Setelah pengumpulan data tersebut, penulis memilih dan menyusun data yang telah dikumpulkan untuk memperkuat argumen penulis dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

I.10 Sistematika Pembabakan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan isi daripada pendahuluan di antaranya menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika pembabakan.

BAB II DINAMIKA KONFLIK DI LIBYA 2011 DAN INTERVENSI PERANCIS DI LIBYA

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara lengkap awal dan akhir konflik yang berlangsung di Libya dan selanjutnya akan di jelaskan bagaimana intervensi militer Perancis di Libya berlangsung.

BAB III KEPENTINGAN PERANCIS TERHADAP INTERVENSI DI LIBYA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kepentingan Perancis dalam intervensi militernya ke Libya.

BAB IV KESIMPULAN

Merupakan penutup dari seluruh pembahasan dari penelitian berupa kesimpulan yang di dapat yaitu berupa jawaban dari permasalahan yang akan di bahas.